

NOTA KESEPAHAMAN

Nomor : K1136/MOV/INT/Des/2023

Nomor : 9 Tahun 2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan Pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

LAODE M. SYARIF

DIREKTUR EKSEKUTIF KEMITRAAN BAGI PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN
berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
KEMITRAAN BAGI PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN

dan

SARAH SADIQA

**Pit. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**
berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama secara sinergis di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepakatan ini akan diatur dalam Rencana Kerja antara pejabat pimpinan tinggi di lingkungan kerja PARA PIHAK.

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 September 2024 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

Jakarta, 27 Desember 2023

Jakarta, 19 Desember 2023

**KEMITRAAN BAGI PEMBARUAN
TATA PEMERINTAHAN
DIREKTUR EKSEKUTIF,**

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
Pit. SEKRETARIS UTAMA,**

ttd

ttd

LAODE M. SYARIF

SARAH SADIQA

LAMPIRAN

NO.	PROGRAM KERJA SAMA LKPP DAN KEMITRAAN	UNIT ORGANISASI
KEPEMILIKAN MANFAAT (<i>BENEFICIAL OWNERSHIP</i>)		
Dukungan untuk LKPP:		
1	a. Dukungan teknis melalui Penyediaan Konsultan <i>Information Technology</i> (IT) untuk pengembangan alat analisis untuk meningkatkan kemampuan sistem <i>e-procurement</i> dalam mengidentifikasi <i>Beneficial Owners</i> yang sama di perusahaan yang berbeda.	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
	b. Pengembangan panduan teknis dan fungsional teknologi informasi untuk peningkatan/pemutakhiran sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
	c. Dukungan untuk penyusunan panduan kewajiban pendaftaran <i>Beneficial Ownership</i> oleh vendor dalam pendaftaran <i>e-tender/e-catalogue</i> dan <i>e-purchasing</i> dan <i>content media campaign</i> .	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
INTEROPERABILITAS DATA		
Dukungan untuk LKPP:		
2	a. Penyediaan konsultan teknis untuk mengembangkan fitur dan panduan awal spesifikasi teknis/fungsional <i>Application Programming Interface (API) Gateway</i> yang mengatur akses <i>API</i> , konten yang tersedia, dan hal-hal lain yang terkait dengan <i>API</i> sesuai dengan kebutuhan.	1. Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan 2. Direktorat Sistem Pengadaan Digital 3. Direktorat Pasar Pengadaan Digital
	b. Integrasi/akses LKPP pada sistem pendaftaran perusahaan di sistem Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui fasilitasi <i>multistakeholder workshop</i> , dan menyediakan konsultan teknis untuk menyusun spesifikasi teknis/fungsional untuk setiap solusi terkait teknologi informasi yang dibutuhkan.	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
EVALUASI KINERJA		
Dukungan untuk LKPP:		
3	Dukungan penyusunan Kajian dan Rekomendasi Kebijakan tentang Pembaruan Indikator Penilaian Kinerja Vendor yang dapat Diverifikasi, obyektif dan sesuai dengan Praktek Terbaik dari Negara-Negara Lain.	1. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum 2. Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

KETERLIBATAN PUBLIK			
Dukungan untuk LKPP:			
4	a.	Mendorong pembentukan dan penguatan kapasitas komunitas muda " <i>Youth Integrity Center</i> " sebagai kanal independen pemantau integritas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di level provinsi. Hasil pemantauan <i>Youth Integrity Center</i> akan menjadi bahan advokasi perbaikan kebijakan perubahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada level daerah (provinsi).	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
	b.	Integrasi <i>Open Tender</i> dengan <i>e-Pengaduan</i> , termasuk mendorong <i>Open API</i> untuk <i>e-pengaduan</i> .	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
	c.	Kajian Pengembangan Transformasi Digital pada Layanan Penanganan Permasalahan Hukum (Pemberian Nasihat dan Pendapat Hukum, Penyelesaian Sengketa Kontrak, Pengaduan dan Pemberian Keterangan Ahli).	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

**KEMITRAAN BAGI PEMBARUAN TATA
PEMERINTAHAN
DIREKTUR EKSEKUTIF,**

ttd

LAODE M. SYARIF

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
Plt. SEKRETARIS UTAMA,**

ttd

SARAH SADIQA